

## SISTEM PERENCANAAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan Pendidikan

Sanniati Muddin<sup>1</sup> Musfirah<sup>2</sup> Alwan Suban<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Corresponding author: [sanniati.111@gmail.com](mailto:sanniati.111@gmail.com)<sup>1</sup>, [musfhirah00@gmail.com](mailto:musfhirah00@gmail.com)<sup>2</sup>, [alwan.subhan@uin-alauddin.ac.id](mailto:alwan.subhan@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract (English)

The budget financing planning system is an important element in supporting the implementation of quality and sustainable education. This research aims to design and develop a system that is able to integrate the planning, allocation and supervision processes of education budgets efficiently and transparently. This approach includes needs analysis, preparation of a system framework, and implementation of information technology to support data-based decision making. By utilizing a systematic methodology, this research produces a budget planning model that is responsive to educational needs, accommodates the dynamics of policy change, and supports the involvement of various stakeholders. The results of this system are expected to increase the efficiency of resource management, reduce the potential for budget irregularities, and encourage equal access to education. These findings provide a significant contribution in supporting the government's efforts to achieve inclusive and sustainable national education development goals.

### Article History

Submitted: 24 Desember 2024

Accepted: 29 Desember 2024

Published: 30 Desember 2024

### Key Words

Budget Planning, Education Financing, Transparency, Education Policy

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, tantangan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan sering kali menjadi kendala utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sistem perencanaan pembiayaan anggaran memiliki peran penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif (Rahmawati, 2018). Sistem perencanaan pembiayaan pendidikan adalah bagian integral dari kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai pemerataan dan kualitas pendidikan (UNESCO, 2015). Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memegang peranan penting sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem pendidikan yang baik memerlukan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah pembiayaan yang terencana dengan baik. Perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan menjadi salah satu komponen strategis untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai dan efisien dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. Namun, tantangan seperti alokasi anggaran yang tidak merata, ketidakefisienan dalam distribusi sumber daya, dan kurangnya transparansi sering menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan yang optimal.

Sistem perencanaan pembiayaan anggaran merupakan elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, pendidikan diatur sebagai hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945. Implementasi dari hak ini memerlukan perencanaan pembiayaan yang sistematis untuk memastikan layanan pendidikan

yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Perencanaan anggaran pendidikan melibatkan berbagai aspek, termasuk alokasi sumber daya, manajemen biaya, serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) dan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur atau *literatur review* untuk mengkaji lebih dalam mengenai Sistem Perencanaan Pembiayaan Anggaran dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pendidikan dengan pendekatan analisis tematik yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan teori yang berkaitan dengan perencanaan pembiayaan anggaran. Sumber data berasal dari artikel jurnal, buku, dan laporan institusi yang relevan dan diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dengan topik yang sejenis. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi tren dan praktik terbaik dalam sistem pembiayaan pendidikan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Perencanaan Pembiayaan Anggaran Pendidikan

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk semua komponen kegiatan (Mulyono, 2010). Perencanaan pembiayaan anggaran adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, perencanaan ini mencakup identifikasi kebutuhan biaya, perumusan kebijakan anggaran, hingga pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dana. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya mencukupi secara kuantitatif tetapi juga efektif secara kualitatif.

Perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memastikan alokasi, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan dalam sektor pendidikan dilakukan secara efisien dan efektif. Konsep ini mencakup berbagai pendekatan yang mengintegrasikan perencanaan jangka panjang, analisis kebutuhan, serta evaluasi hasil guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan internasional. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan memainkan peran sentral sebagai sarana untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan pemerataan layanan pendidikan (UNESCO, 2021).

Perencanaan pembiayaan pendidikan didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan keluaran terbaik, sedangkan efektivitas menilai sejauh mana anggaran pendidikan mendukung pencapaian target pendidikan. Keberlanjutan menekankan pentingnya pendanaan jangka panjang yang stabil untuk mendukung infrastruktur, pelatihan tenaga pengajar, dan program pendidikan lainnya (World Bank, 2020).

Dalam implementasinya, perencanaan pembiayaan pendidikan mencakup empat komponen utama:

1. Estimasi kebutuhan biaya untuk berbagai tingkatan pendidikan.

2. Identifikasi sumber pendanaan, baik dari pemerintah, donor internasional, maupun sektor swasta.
3. Alokasi anggaran yang adil untuk memastikan pemerataan akses pendidikan.
4. Pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas (Baker *et al.*, 2018).

Perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan merupakan upaya sistematis untuk menentukan kebutuhan dana dan alokasi sumber daya finansial dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Konsep ini melibatkan prinsip, tujuan, dan pendekatan yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien. Berikut ini adalah Konsep Dasar Perencanaan Pembiayaan Anggaran Pendidikan:

## **1. Prinsip Perencanaan Pembiayaan Anggaran**

### **• Efisiensi**

Prinsip ini berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya agar hasil yang diperoleh maksimal. Perencanaan efisien memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan dampak signifikan terhadap tujuan pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran atau pengembangan infrastruktur (Yusuf, 2022). Efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan adalah kemampuan untuk menggunakan dana secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan tanpa pemborosan. Efisiensi mencakup aspek penggunaan anggaran yang tepat, pengalokasian sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, serta pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

### **• Efektivitas**

Efektivitas berarti anggaran yang disediakan harus memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Contohnya adalah pengalokasian anggaran untuk pelatihan guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi profesional mereka, yang berdampak pada hasil pembelajaran siswa (Suryadi, 2023). Efektivitas dalam pengelolaan dana pendidikan mengacu pada sejauh mana alokasi dan penggunaan dana dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga secara strategis, untuk menghasilkan hasil yang konkret dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan.

### **• Transparansi dan Akuntabilitas**

Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Transparansi memungkinkan publik dan pemangku kepentingan memantau penggunaan dana pendidikan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah (Susilo, 2023). Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara jujur, adil, dan efektif.

### **• Keberlanjutan**

Keberlanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran mendukung program pendidikan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup pengembangan strategi pembiayaan yang konsisten, seperti investasi pada infrastruktur yang tahan lama atau program pendidikan berkelanjutan (Rini, 2022). Keberlanjutan dalam pengelolaan dana pendidikan merujuk pada kemampuan untuk menjaga dan mengelola dana secara terus-menerus untuk mendukung tujuan pendidikan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti

pengelolaan anggaran yang efisien, penyediaan sumber daya yang berkelanjutan, serta perencanaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang ada.

## **2. Tujuan Perencanaan Pembiayaan Anggaran Pendidikan**

Tujuan perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan adalah untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai dan efisien guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- **Mendukung Pemenuhan Standar Pendidikan Nasional**

Perencanaan anggaran dirancang untuk memastikan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kurikulum yang relevan, dan pengadaan tenaga pendidik yang kompeten. Pemenuhan standar ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan memastikan setiap siswa mendapatkan layanan pendidikan yang layak (Kurniawan, 2023). Pemenuhan standar pendidikan nasional adalah tujuan utama dalam setiap sistem pendidikan. Dana pendidikan yang dikelola dengan baik berperan penting dalam memastikan bahwa setiap sekolah dan lembaga pendidikan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, kualitas pengajaran, dan kurikulum yang relevan.

- **Pemerataan Akses Pendidikan**

Salah satu tujuan utama perencanaan pembiayaan adalah mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah terpencil dan perkotaan. Dengan alokasi anggaran yang adil, pemerintah dapat mendukung pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil dan menyediakan program bantuan, seperti subsidi pendidikan atau beasiswa, bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Lestari, 2022). Pemerataan akses pendidikan merupakan tujuan utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Dalam konteks ini, pengelolaan dana pendidikan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

- **Mendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Anggaran pendidikan dialokasikan untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas, seperti pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Fokus pada kualitas pendidikan memastikan bahwa siswa tidak hanya memiliki akses, tetapi juga menerima pendidikan yang relevan dan bermutu tinggi (Yusuf, 2022). Peningkatan kualitas pendidikan adalah tujuan utama dalam pengelolaan dana pendidikan yang efisien. Untuk mencapai tujuan ini, perlu ada kebijakan yang mendukung pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penggunaan dana pendidikan harus diarahkan pada upaya memperbaiki aspek-aspek krusial dalam pendidikan, seperti kualitas pengajaran, aksesibilitas pendidikan, fasilitas yang memadai, serta pengembangan SDM.

## **3. Komponen Perencanaan Pembiayaan Anggaran**

Komponen Perencanaan Pembiayaan Anggaran adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun dan mengelola pembiayaan dalam sebuah anggaran. Proses ini bertujuan memastikan bahwa sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan

kegiatan organisasi tersedia, cukup, dan digunakan secara efisien. Untuk mencapai keberhasilan dalam perencanaan pembiayaan, diperlukan beberapa komponen penting, yaitu:

- **Analisis Situasi**

Identifikasi kebutuhan dan tantangan pendidikan menjadi langkah awal yang krusial. Hal ini mencakup analisis terhadap sarana dan prasarana yang tersedia, kondisi tenaga pendidik, serta hambatan lain yang dihadapi sekolah (Lestari, 2022). Analisis situasi adalah langkah awal yang penting dalam perencanaan dan pengelolaan dana pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memahami kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang ada untuk meningkatkan pengelolaan dana pendidikan. Melalui analisis situasi, berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana pendidikan dapat dipetakan, sehingga kebijakan dan strategi yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ada.

- **Proyeksi Pendanaan**

Proyeksi dana dilakukan untuk menghitung besaran anggaran yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Perhitungan ini meliputi aspek jangka pendek dan panjang untuk memastikan kesinambungan pembiayaan (Suryadi, 2023). Proyeksi pendanaan adalah perencanaan jangka panjang yang bertujuan untuk memperkirakan dan merencanakan kebutuhan dana pendidikan di masa depan. Proyeksi ini penting agar sumber daya dapat dialokasikan dengan tepat dan menghindari kekurangan atau pemborosan dalam pendanaan pendidikan. Proyeksi pendanaan mencakup estimasi terhadap sumber pendapatan, kebutuhan anggaran, dan skenario pengeluaran yang disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

- **Alokasi Sumber Daya**

Penentuan alokasi anggaran dilakukan untuk berbagai komponen, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, penyediaan bahan ajar, atau program beasiswa. Alokasi yang proporsional sangat penting agar semua aspek pendidikan dapat berjalan optimal (Kurniawan, 2023). Alokasi sumber daya dalam pengelolaan dana pendidikan merupakan proses distribusi anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan yang baik harus memperhatikan efisiensi, relevansi, dan keadilan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pendidikan terpenuhi secara optimal, terutama di daerah tertinggal.

#### **4. Tantangan dalam Perencanaan Pembiayaan Anggaran**

Perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Ketimpangan Alokasi Anggaran**

Salah satu tantangan terbesar dalam perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan adalah ketimpangan distribusi dana antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di daerah perkotaan sering kali mendapatkan anggaran yang lebih besar karena lebih mudah dijangkau dan memiliki kapasitas lebih tinggi dalam penggunaan dana. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan atau terpencil masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup, meskipun mereka memerlukan anggaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan akses teknologi. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan dalam kualitas pendidikan di Indonesia (Suryadi, 2023). Ketimpangan alokasi

anggaran pendidikan merupakan isu krusial yang berdampak pada pemerataan akses dan mutu pendidikan di berbagai wilayah. Ketimpangan ini biasanya muncul akibat berbagai faktor, seperti perbedaan kondisi geografis, kapasitas fiskal daerah, dan distribusi kebutuhan pendidikan.

## 2. Minimnya SDM Berkualitas dalam Perencanaan

Tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam merencanakan anggaran pendidikan berbasis data dan kinerja. Perencanaan anggaran yang efektif memerlukan tenaga ahli yang mampu mengelola data secara akurat dan menyusunnya berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya. Namun, masih banyak daerah yang kekurangan tenaga perencana yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Keterbatasan SDM yang berkualitas mengakibatkan ketidakakuratan dalam alokasi dana, pemborosan, atau bahkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan (Lestari, 2022). Minimnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam perencanaan anggaran pendidikan merupakan salah satu hambatan utama yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan. SDM yang tidak kompeten dalam menyusun perencanaan berbasis data dan kebutuhan dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, sehingga berimplikasi pada mutu pendidikan.

## 3. Keterbatasan Teknologi dalam Pengelolaan Anggaran

Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, sistem pengelolaan anggaran pendidikan masih bergantung pada metode manual. Hal ini sangat menghambat efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan dana. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, proses alokasi dan pemantauan anggaran menjadi lambat, dan data yang digunakan tidak selalu akurat atau terkini. Penggunaan teknologi dalam perencanaan anggaran dapat membantu pemerintah dan sekolah memantau alokasi dana, mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak, dan memastikan anggaran digunakan dengan lebih tepat sasaran (Rini, 2022). Keterbatasan teknologi merupakan salah satu hambatan utama dalam pengelolaan anggaran pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Minimnya akses terhadap perangkat dan sistem digital menyebabkan pengelolaan anggaran sering dilakukan secara manual, yang kurang efisien, rentan terhadap kesalahan, dan sulit dipantau.

### B. Pendekatan dalam Perencanaan Pembiayaan

Pendekatan dalam perencanaan pembiayaan merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengatur, dan mengelola sumber daya keuangan secara efisien guna mencapai tujuan organisasi. Pendekatan dalam perencanaan pembiayaan adalah strategi dan metode yang digunakan untuk memastikan kebutuhan keuangan organisasi atau individu dapat terpenuhi dengan cara yang efisien, terjangkau, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan modern, dan pendekatan strategis.

#### 1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini berfokus pada pengelolaan arus kas, penganggaran, dan pengendalian biaya. Perencanaannya bersifat jangka pendek dan berorientasi pada stabilitas keuangan. Aspek utama meliputi Penganggaran berbasis historis, yang melihat data masa lalu sebagai dasar perencanaan dan Pengendalian anggaran, yang memprioritaskan efisiensi pengeluaran. Pendekatan ini cocok untuk organisasi dengan risiko rendah dan struktur keuangan yang sederhana (Abdel-Kader & Luther, 2017)

#### 2. Pendekatan Modern

Pendekatan modern menggunakan alat analitis dan teknologi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Beberapa ciri utamanya adalah: *Forecasting* dinamis, memanfaatkan

analisis data untuk prediksi keuangan. Penggunaan teknologi digital, seperti perangkat lunak *Enterprise Resource Planning* (ERP), untuk integrasi perencanaan keuangan dengan aktivitas operasional. Fokus pada risiko, yaitu dengan menggunakan analisis sensitivitas dan model simulasi. Pendekatan ini relevan untuk lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

### 3. Pendekatan Strategis

Pendekatan ini mengintegrasikan perencanaan pembiayaan ke dalam strategi organisasi secara keseluruhan. Karakteristiknya mencakup: Perencanaan jangka panjang, yang mempertimbangkan visi dan misi organisasi. Pengambilan keputusan berbasis nilai tambah, seperti analisis manfaat-biaya dan pengukuran dampak finansial. Keterlibatan stakeholder, yang memastikan semua pihak terkait memahami dan mendukung strategi keuangan. Pendekatan strategis banyak digunakan dalam sektor publik dan swasta untuk memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang (Norton, 2021).

Dalam praktiknya, pemilihan pendekatan bergantung pada jenis organisasi, tujuan, kompleksitas, serta situasi keuangan yang dihadapi. Perencanaan pembiayaan yang baik seringkali mengombinasikan beberapa pendekatan untuk mencapai hasil yang optimal. Pendekatan dalam perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan bertujuan untuk memastikan pengalokasian dana yang tepat, efisien, dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Beberapa pendekatan utama meliputi:

- **Pendekatan Berbasis Kebutuhan (*Needs-Based Planning*)**

Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Faktor seperti jumlah siswa, kondisi fasilitas, dan kebutuhan tenaga pendidik menjadi dasar utama dalam menentukan alokasi anggaran. Pendekatan ini memastikan bahwa pembiayaan lebih relevan dengan kondisi di lapangan dan mendukung solusi atas permasalahan spesifik (Rini, 2022). Pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan anggaran pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kondisi nyata dan prioritas di lapangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah siswa, kondisi fasilitas, dan kebutuhan tenaga pendidik, pendekatan ini memberikan solusi yang lebih relevan dan efektif untuk mendukung mutu pendidikan.

- **Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*)**

Fokus pendekatan ini adalah pada pencapaian hasil kinerja pendidikan. Anggaran dialokasikan berdasarkan indikator kinerja tertentu, seperti tingkat partisipasi sekolah, angka kelulusan, dan peningkatan kompetensi siswa. Dengan demikian, pengelolaan dana menjadi lebih terukur dan terarah pada peningkatan mutu hasil pendidikan (Suryadi, 2023). Pendekatan berbasis hasil kinerja pendidikan (*performance-based budgeting*) menempatkan indikator kinerja sebagai fokus utama dalam pengelolaan dana pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan, serta mendorong efisiensi dan akuntabilitas.

- **Pendekatan Berbasis Data (*Data-Driven Decision Making*)**

Pendekatan ini menggunakan data valid dan terkini untuk merancang alokasi anggaran yang akurat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, analisis berbasis data

membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta memastikan pengambilan keputusan yang berbasis bukti (Yusuf, 2022). Pendekatan berbasis data untuk perencanaan anggaran pendidikan adalah solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Dengan memanfaatkan data valid dan terkini serta teknologi informasi, pendekatan ini memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

### **C. Tantangan dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan**

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran pemerintah, terutama di negara berkembang, yang sering kali membatasi investasi di sektor pendidikan. Selain itu, ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan lapangan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta dampak ekonomi global seperti pandemi COVID-19, telah memperumit proses perencanaan pembiayaan (OECD, 2021). Perencanaan pembiayaan pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya, alokasi, maupun implementasi. Berikut adalah penjelasan terkait tantangan utama:

#### **1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah**

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Sebagian besar pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran publik, namun sering kali porsi ini masih di bawah kebutuhan yang ideal. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan miskin.

#### **2. Kesenjangan dalam Distribusi Dana**

Sistem pembiayaan pendidikan menghadapi tantangan dalam memastikan alokasi yang merata antara wilayah kaya dan miskin. Model seperti Flat Grant memberikan jumlah dana yang sama untuk setiap siswa, namun tidak cukup mengatasi ketidaksetaraan sumber daya. Sementara itu, model Equalization yang mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat memerlukan kebijakan yang lebih kompleks.

#### **3. Transparansi dan Akuntabilitas**

Dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan, transparansi sering kali menjadi isu krusial. Kurangnya sistem pengawasan yang baik dapat menyebabkan penyelewengan dana, sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai secara optimal.

#### **4. Peningkatan Kualitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan pembiayaan pendidikan membutuhkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman baik tentang prinsip akuntansi dan efisiensi anggaran. Kurangnya pelatihan di tingkat lokal sering kali menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan yang efektif (Kesuma, R *et al.*, 2018).

Perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### **1. Ketimpangan Alokasi Anggaran**

Salah satu tantangan utama dalam perencanaan pembiayaan pendidikan adalah ketimpangan dalam alokasi dana antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun dana pendidikan semakin meningkat, namun distribusinya belum merata. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, buku teks, dan akses teknologi. Sementara itu, sekolah di kota besar sering kali memperoleh anggaran yang

lebih besar karena memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas yang lebih tinggi (Ahmad, 2023). Hal ini sering sekali terjadi bahwa sekolah dikota akan jauh lebih makmur dan jaya dibandingkan dengan sekolah yang ada di desa.

## **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Perencanaan**

Kurangnya tenaga perencana yang terlatih dan berkompeten dalam bidang pengelolaan keuangan pendidikan berbasis data dan kinerja menjadi tantangan besar dalam perencanaan anggaran. Banyak daerah yang kekurangan ahli dalam merencanakan anggaran secara akurat dan efisien, yang berakibat pada ketidaktepatan dalam alokasi dana. Ini menyebabkan pemborosan atau bahkan ketidakefektifan dalam penggunaan dana pendidikan (Sari, 2023). Tidak bisa kita pungkiri bahwa keterbatasan SDM ini juga sering kali menjadi permasalahan dalam perencanaan karena kurangnya SDM yang mumpuni dibidangnya.

## **3. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur**

Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, yang masih bergantung pada sistem manual dalam pengelolaan anggaran. Ketergantungan ini menghambat proses perencanaan yang berbasis data, yang dapat memperburuk efektivitas pengelolaan dana. Selain itu, terbatasnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah juga membatasi penggunaan aplikasi dan platform digital untuk mendukung perencanaan yang lebih efisien (Rini, 2022). Bukan lagi hal yang asing bagi kita jika membahas teknologi dan infrastruktur karena ini memang menjadi permasalahan bagi lembaga pendidikan tertentu.

## **4. Keterbatasan Anggaran Pemerintah**

Meskipun anggaran pendidikan terus meningkat, namun anggaran yang tersedia masih sering dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan, terutama dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Anggaran yang terbatas juga menghambat kemampuan pemerintah untuk memenuhi standar nasional pendidikan di seluruh daerah, khususnya di daerah yang sangat membutuhkan (Fatmawati, 2023). Keterbatasan anggaran dari pemerintah menjadi salah satu masalah yang dihadapi lembaga dalam pengelolaan dana.

## **5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan**

Partisipasi masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan siswa, dalam proses perencanaan anggaran pendidikan masih terbatas. Padahal, keterlibatan mereka sangat penting untuk menentukan kebutuhan riil di lapangan dan menghindari pemborosan atau alokasi yang tidak tepat. Kurangnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga menghambat upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Wahyudi, 2023). Pada prinsipnya partisipasi masyarakat sangat diharapkan namun hal ini minim terjadi dalam penerapannya.

## **6. Birokrasi yang Rumit dan Proses yang Lambat**

Proses pengajuan dan pencairan anggaran pendidikan sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan waktu yang lama. Hal ini memperlambat implementasi program-program pendidikan yang sudah direncanakan. Pengelolaan anggaran yang memerlukan banyak tahapan administrasi dan verifikasi dapat menyebabkan dana tidak segera digunakan untuk tujuan yang dimaksud, sehingga mengurangi dampaknya terhadap kualitas pendidikan (Wahyudi, 2023). Birokrasi ini kerap menjadi permasalahan karena kadang membuat lembaga kesusahan dalam memenuhi semua syarat yang ditentukan.

## 7. Fluktuasi dan Ketidakpastian Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, seperti resesi atau fluktuasi harga barang dan jasa, juga mempengaruhi perencanaan pembiayaan pendidikan. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, anggaran pendidikan sering kali mengalami pemotongan atau penundaan, yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Ini menuntut pemerintah untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam merencanakan dan mengelola anggaran pendidikan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pendidikan meskipun terjadi perubahan ekonomi (Widodo, 2023). Hal seperti ini tidak bisa kita kendalikan dalam sesaat maka hal ini menjadi tantangan dalam melihat skala prioritas yang dibutuhkan lembaga pendidikan.

Meskipun pendekatan dan komponen yang dirancang sudah baik, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, antara lain:

### • Ketimpangan Alokasi

Dana pendidikan sering kali tidak merata, dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil menerima alokasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan sekolah di perkotaan. Hal ini memperburuk kesenjangan mutu pendidikan (Susilo, 2023). Kesenjangan dalam alokasi dana pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah terpencil dan perkotaan adalah masalah yang sudah lama dihadapi dalam sistem pendidikan Indonesia. Ketimpangan ini memengaruhi berbagai aspek, seperti kualitas fasilitas, tenaga pengajar, dan akses terhadap sumber belajar yang memadai.

### • Minimnya SDM Berkualitas

Banyak daerah mengalami keterbatasan tenaga ahli yang mampu menyusun perencanaan anggaran berbasis kinerja dan data. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan dana pendidikan (Lestari, 2022). Keterbatasan tenaga ahli yang mampu menyusun perencanaan anggaran berbasis kinerja dan data menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana pendidikan di berbagai daerah. Hal ini memengaruhi efektivitas alokasi, penggunaan, dan evaluasi anggaran, sehingga mengurangi dampak positif yang seharusnya bisa dicapai.

### • Keterbatasan Teknologi

Sebagian besar daerah masih menggunakan metode manual dalam mengelola anggaran. Minimnya akses terhadap teknologi dan pelatihan digital menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efisiensi perencanaan (Rini, 2022). Penggunaan metode manual dalam pengelolaan anggaran pendidikan masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Minimnya akses terhadap teknologi modern dan pelatihan digital memperlambat transisi menuju sistem yang lebih efisien dan berbasis data.

## PENUTUP

Sistem perencanaan pembiayaan anggaran yang efektif adalah fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan harus menjadi pedoman utama dalam perencanaan ini. Pendekatan berbasis kebutuhan, kinerja, dan data yang valid menjadi strategi kunci untuk memastikan alokasi dana yang tepat sasaran.

Namun, tantangan seperti ketimpangan alokasi, minimnya SDM berkualitas, dan keterbatasan teknologi masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan anggaran,

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data, serta mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi. Melalui sinergi berbagai pihak dan komitmen yang berkelanjutan, sistem perencanaan pembiayaan anggaran dapat berfungsi secara optimal, mendukung keberlanjutan pendidikan, dan menciptakan pemerataan mutu di seluruh wilayah Indonesia. Dengan langkah ini, cita-cita pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas dapat tercapai.

Implikasi sistem perencanaan pembiayaan anggaran yang efektif tidak hanya terbatas pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga mencakup pemerataan akses, efisiensi pengelolaan, dan keberlanjutan program pendidikan. Dengan implementasi yang tepat, sistem ini mampu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan pendidikan nasional secara keseluruhan. Sistem perencanaan pembiayaan anggaran pendidikan yang efektif memberikan dampak luas tidak hanya pada peningkatan mutu dan pemerataan akses, tetapi juga pada tata kelola pendidikan secara keseluruhan. Efisiensi dan transparansi yang dihasilkan memperkuat kepercayaan publik, sementara fokus pada keberlanjutan dan penguatan SDM menciptakan fondasi yang kokoh untuk perkembangan jangka panjang. Dengan implementasi yang konsisten dan dukungan berbagai pihak, sistem ini akan menjadi katalisator dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, bermutu tinggi, dan berdaya saing global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Kader & Luther. (2017). *Management accounting practices in the UK*. Routledge.
- Baker, B. D., Farrie, D., & Sciarra, D. G. (2018). *Is School Funding Fair? A National Report Card*.
- Ahmad, T., & Rahayu, S. (2023). *Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Efisiensi Anggaran Pendidikan*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pendidikan.
- Bank, W. (2020). Education Finance in Developing Countries. *Trends and Challenges*.
- Kesuma, R., et al. (2018). *Efficient Deployment of Teacher: A Policy Note*.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan (Ar Ruzz Me)*.
- Norton, K. &. (2021). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Review Press.
- OECD. (2021). *The Future of Education Finance*.
- Rahmawati. (2018). Strategi Pembiayaan Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(3), 45.
- UNESCO. (2015). *Education for All Global Monitoring Report*.
- UNESCO. (2021). Global Education Monitoring Report. *Financing Education*.
- Fauzi, H., & Widodo, P. (2022). *Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Daerah Perbatasan: Kajian Empiris*.
- Handayani, M., & Sudirman, A. (2023). *Peningkatan Kompetensi SDM dalam Perencanaan Anggaran Pendidikan*.
- Hartono, B., & Fadli, R. (2023). *Pengaruh Digitalisasi pada Perencanaan Pembiayaan Pendidikan*.
- Putri, N. S., & Hidayat, M. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Pendidikan*.
- Ramadhan, I., & Supriyadi, T. (2023). *Penerapan Sistem Data-Driven dalam Perencanaan Pendidikan*.

- Nurhadi, A., & Lestari, R. (2022). *Pemerataan Pendidikan di Daerah 3T: Peran Anggaran Berbasis Kebutuhan*.
- Rini, D. (2022). *Efektivitas Pendekatan Data-Driven dalam Perencanaan Anggaran Pendidikan*.
- Suryadi, A., & Susilo, T. (2023). *Penganggaran Berbasis Kinerja untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*.
- Santoso, A., & Wibowo, L. (2023). *Efektivitas Anggaran Pendidikan dalam Mendukung Kualitas Guru*.
- Syahrul, M., & Zaini, A. (2023). *Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Daerah 3T*.
- Utami, R., & Farida, H. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemerataan Dana Pendidikan*.
- Fatmawati, N. (2023). *Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas*.
- Wahyudi, M. (2023). *Implementasi Sistem Digital dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan*.
- Yusuf, M., et al. (2022). *Prinsip-Prinsip Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Pendidikan*.
- Setiawan, E., & Sari, D. (2023). *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui Pendekatan Berbasis Kinerja*.
- Sari, A. (2023). *Peran Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran Pendidikan di Era Digital*.
- Ahmad, Z., & Wijayanti, S. (2023). *Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia*.